SKRIPSI

DAMPAK KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA TERHADAP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2023-2024

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Elshinta Deannova

NIM. E1111221069

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

DAMPAK KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA TERHADAP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2023-2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Elshinta Deannova

NIM. E1111221069

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAMPAK KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA TERHADAP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2023-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Elshinta Deannova
NIM. E1111221069

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ori Fahriansyah, S. IP, M.Si
NIP. 19691222002121002

Tanggal: 15/06/2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 199302192023211013

Tanggal: 17/06/2026

ii

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA TERHADAP KEAMANAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2023-2024

Oleh:
Elshinta Deannova
NIM. E1111221069

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang Sidang 1

Tim penguji

Ketua

Ori Fahriansyah, S. IP, M.Si
NIP. 196911222002121002

Sekretaris

Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I
NIP. 199302192023211013

Penguji Utama

Dr. Ira Patriani, M.Si.
NIP. 197611302003122001

Penguji Pendamping

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI.
NIP. 199204232019032013

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia di Indonesia selama 2023–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dan menganalisis fenomena berdasarkan konsep *Human Security* Tadjbakhsh dan Chenoy yang mencakup keamanan sosial-ekonomi, personal, lingkungan, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya tidak memberikan dampak signifikan terhadap keamanan sosial-ekonomi masyarakat lokal karena tidak ditemukan gangguan signifikan terhadap akses kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Sebaliknya, kedatangan pengungsi Rohingya berdampak terhadap keamanan personal melalui *freedom from fear* berupa kekhawatiran, ketidakpastian, dan persepsi risiko pada sebagian masyarakat. Dampak juga ditemukan pada keamanan lingkungan melalui tekanan terhadap sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan ruang hidup di sekitar lokasi penampungan, serta pada keamanan politik melalui keterbatasan kapasitas pemerintah, ketidakpastian kebijakan, konflik sosial dan penolakan, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menyimpulkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya pada 2023–2024 tidak berdampak signifikan terhadap keamanan sosial-ekonomi, tetapi berdampak terhadap keamanan personal, lingkungan, dan politik masyarakat lokal.

Kata kunci: Indonesia, Keamanan Manusia, Keamanan Politik, Pengungsi Rohingya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the arrival of Rohingya refugees on human security in Indonesia during 2023–2024. Employing a qualitative descriptive method and a literature review approach, the study analyzes the phenomenon based on the human security framework proposed by Tadjbakhsh and Chenoy, which encompasses socio-economic, personal, environmental, and political security. The findings indicate that the arrival of Rohingya refugees did not significantly impact the socio-economic security of local communities, as no significant disruptions were observed regarding access to healthcare, housing, education, employment, and income. Conversely, the arrival affected personal security specifically the dimension of "freedom from fear" by generating anxiety, uncertainty, and perceived risks among segments of the population. Impacts were also identified regarding environmental security, manifested as strain on sanitation, clean water supplies, waste management, and living space around shelter sites, as well as political security, characterized by limited government capacity, policy uncertainty, social conflict and resistance, and declining public trust in the government. The study concludes that while the arrival of Rohingya refugees in 2023–2024 did not significantly affect socio-economic security, it did impact the personal, environmental, and political security of local communities.

Keywords: *Human Security, Indonesia, Political Security, Rohingya refugees.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Manusia di Indonesia Tahun 2023–2024”. Penelitian ini membahas dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia masyarakat lokal di Indonesia. Meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya selama 2023–2024 menimbulkan berbagai respons dari pemerintah dan masyarakat di wilayah penerima, terutama Aceh, Riau, dan Sumatera Utara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kondisi sosial, rasa aman, lingkungan, serta kapasitas pemerintah dalam menangani pengungsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia di Indonesia tahun 2023-2024?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia di Indonesia berdasarkan dimensi keamanan sosial-ekonomi, personal, lingkungan, dan politik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu pengungsi dan keamanan manusia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung analisis penelitian, penulis menggunakan konsep Human Security yang dikemukakan oleh Tadjbakhsh dan Chenoy. Konsep ini menjelaskan bahwa keamanan manusia tidak hanya berfokus pada keamanan

negara, tetapi juga pada perlindungan individu dari berbagai ancaman yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Dalam penelitian ini, keamanan manusia dianalisis melalui empat dimensi, yaitu keamanan sosial-ekonomi, keamanan personal, keamanan lingkungan, dan keamanan politik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen pemerintah, berita, serta berbagai sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya dan keamanan manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya memberikan dampak yang berbeda pada setiap dimensi keamanan manusia. Pada dimensi sosial-ekonomi, kedatangan pengungsi Rohingya tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, karena penelitian tidak menemukan gangguan signifikan terhadap akses masyarakat terhadap kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, maupun pendapatan.

Pada dimensi personal, kedatangan pengungsi Rohingya berdampak terhadap keamanan personal, terutama dalam bentuk *freedom from fear*. Dampak tersebut terlihat dari munculnya kekhawatiran, ketidakpastian, dan persepsi risiko pada sebagian masyarakat akibat pelarian pengungsi, penolakan, serta berbagai peristiwa yang berkaitan dengan keberadaan pengungsi. Namun, penelitian tidak menemukan bukti bahwa keberadaan pengungsi secara langsung meningkatkan ancaman fisik terhadap masyarakat lokal.

Pada dimensi lingkungan, kedatangan pengungsi Rohingya berdampak terhadap keamanan lingkungan melalui tekanan terhadap sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan ruang hidup di sekitar lokasi penampungan. Sebagian dampak dirasakan masyarakat lokal melalui penggunaan ruang atau sumber daya masyarakat, sementara sebagian lainnya menunjukkan kerentanan pengungsi akibat kondisi penampungan yang tidak memadai. Pada dimensi politik, kedatangan pengungsi Rohingya berdampak terhadap keamanan politik melalui keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, ketidakpastian arah kebijakan, meningkatnya konflik sosial dan penolakan, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan pengungsi.

Secara keseluruhan, kedatangan pengungsi Rohingya selama 2023–2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap keamanan sosial-ekonomi, tetapi berdampak terhadap keamanan personal, lingkungan, dan politik masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak kedatangan pengungsi tidak terjadi secara sama pada seluruh dimensi *Human Security*, melainkan berbeda sesuai dengan bentuk ancaman yang muncul pada masing-masing dimensi.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kapasitas dan pengawasan lokasi penampungan, serta memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat lokal dan konsistensi kebijakan perlu diperkuat agar penanganan pengungsi dapat berjalan secara efektif sekaligus menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penerima.

PERNYATAAN KEASLIAN

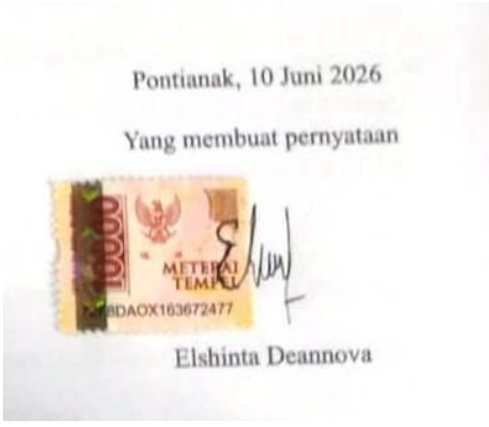
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Elshinta Deannova

Nomor Mahasiswa : E1111221069

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya”
(Q.S An-Najm: 39)

Persembahan:

1. Terimakasih kepada Allah SWT dengan segala rasa syukur yang dalam, setiap proses yang panjang ini bisa dilalui. Dalam setiap kelelahan, diberikan kekuatan. Dalam setiap keraguan, ditunjukkan jalan. Setiap capaian yang diraih adalah buah dari kasih sayangnya. Semoga setiap langkah dan hasil dari perjuangan ini senantiasa berada dalam ridha-nya dan menjadi jalan menuju kebaikan di masa depan.
2. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Abang, serta Kakak saya atas doa, dukungan, perhatian, dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan. Kehadiran dan kepercayaan yang kalian berikan menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga.
3. Kepada seluruh teman-temanku yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah menemani perjalanan ini.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama menjalankan Pendidikan.

5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah menjalani setiap proses hingga titik ini dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Terima kasih karena tetap berusaha, belajar, dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi. Semoga apa yang telah dicapai hari ini menjadi awal dari langkah-langkah baik yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat, penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi yang memiliki judul "Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Manusia di Indonesia tahun 2023-2024" ini berhasil dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat utama untuk mengerjakan skripsi dalam program Strata-1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, H.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus dosen Pembahas Utama yang telah memberikan saran dan masukkan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, sekaligus dosen Pembimbing Utama penulis

selama proses penulisan skripsi., atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Azzomarayosra Wicaksono, S.IP., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas masukan dan arahan yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI**.** selaku Pembahas Pendamping yang telah memberikan saran dan masukkan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan ibu Dosen Hubungan Internasional, Pembantu Dekan, Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan banyak bantuan selama proses perkuliahan.

Penulis mempunyai harapan agar skripsi ini dapat memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan oleh prodi, dan juga dapat memberikan kebermanfaatan yang baik bagi mahasiswa prodi Hubungan Internasional dan pembaca lainnya. Penulis sadar terdapat kekurangan pada penyusunan laporan ini, dengan demikian Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang sesuai dalam penelitian ini.

Pontianak, 30 September 2025

Elshinta Deannova

NIM. E1111221069

DAFTAR ISI

halaman

SKRIPSI 1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR BAGAN xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xx
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 10
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6. Manfaat Penelitian 11
1.6.1. Manfaat Teoritis 11
1.6.2. Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAU PUSTAKA 13
2.1 Konsep Keamanan Manusia 13
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 19
2.3. Alur Pikir Penelitian 24
2.4. Pertanyaan Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1. Jenis Penelitian 26

3.2. Langkah-Langkah Penelitian 27
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....29
3.3.1. Lokasi Penelitian..... 29
3.3.2. Waktu Penelitian 30
3.4. Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 30
3.5. Teknik Pengumpulan Data 32
3.6. Analisis Data 32
3.6.1. Keabsahan Data 33
3.6.2. Teknik Analisis Data 35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 37
4.1 Profil Negara Indonesia 37
4.1.1 Geografi Negara Indonesia 38
4.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia..... 40
4.1.3 Kebijakan Pengungsi di Indonesia..... 42
4.2 Pengungsi Rohingya 47
4.2.1 Kedatangan Pengungsi tahun 2023-2024 49
4.2.2 Kondisi Umum Pengungsi 52
4.3 Wilayah Penerima Pengungsi.....54
4.3.1 Aceh 56
4.3.2 Riau..... 57
4.3.3 Sumatera Utara 59
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 60
5.1 Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Indonesia 60
5.2 Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Personal Masyarakat Lokal di Indonesia.....66
5.3 Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Lingkungan Masyarakat Lokal di Indonesia.....71
5.3.1 Tekanan terhadap Lingkungan dan Sumber Daya Masyarakat..... 73
5.3.2 Degradasi Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Fasilitas Publik..... 74
5.3.3 Overkapasitas Hunian dan Keterbatasan Sanitasi di Lokasi Penampungan..... 75
5.4 Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Politik Masyarakat Lokal di Indonesia.....78
BAB VI PENUTUP 85
6.1 Kesimpulan 85
6.2. Saran.....87
6.3. Keterbatasan Penelitian.....88
DAFTAR PUSTAKA..... 89
LAMPIRAN..... 106

DAFTAR BAGAN

2.1 Alur Pikir Penelitian.....24

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 19
3.1 Waktu Penelitian 30
4.1. Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia Tahun 2022-2025 40
5.1 Lokasi Penampungan Pengungsi Tahun 2023.....62
5.2 Kasus Pelarian Pengungsi Rohingya Tahun 2023-2024 67
5.3 Persebaran dan Jumlah Pengungsi Rohingya pada Beberapa Lokasi Penampungan di Indonesia Tahun 2023-2025 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Kedatangan Pengungsi Rohingya di Pesisir Aceh 4
1.2 Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2020-2025.....5
4.1 Peta Wilayah Indonesia.....38
4.2 Peta Wilayah Penerima Pengungsi.....54
5.3 Tenda Pengungsi di Trotoar Pekanbaru.....74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....106

Lampiran 2: Surat Tugas.....107

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keamanan internasional tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman militer dan pertahanan negara. Perkembangan berbagai isu non-tradisional, seperti konflik internal, migrasi paksa, terorisme, pandemi, perubahan iklim, perdagangan manusia, dan krisis kemanusiaan, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan juga dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Williams, 2013). Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam keamanan internasional adalah arus pengungsi lintas negara. Perpindahan pengungsi dalam jumlah besar tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di negara yang menjadi tujuan maupun negara transit (Kusuma, 2021).

Salah satu krisis pengungsi yang paling berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara adalah krisis Rohingya. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad di Myanmar dan menjadi salah satu masalah kemanusiaan terbesar di kawasan tersebut. Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang sejak lama bermukim di Negara Bagian Rakhine Myanmar yang mengalami diskriminasi sistematis dan penindasan struktural sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948 (*Human Rights Watch*, 2022).

Sejak pemerintahan militer U Ne Win pada tahun 1962, berbagai kebijakan represif mulai diberlakukan terhadap Rohingya, seperti pengusiran paksa, pembunuhan di luar proses hukum, penyitaan properti, pembatasan pekerjaan, hingga larangan dalam beribadah (Mangku, 2021). Kebijakan tersebut memperkuat stigma bahwa Rohingya adalah orang asing di tanah mereka sendiri, karena perbedaan agama dan budaya dengan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha (Kosem & Saleem, 2018). Situasi semakin memburuk setelah diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang hanya mengakui 135 kelompok etnis sebagai ras nasional, tanpa mencantumkan Rohingya di dalamnya (*Human Rights Watch,* 2022). Akibatnya, etnis Rohingya kehilangan hak-hak dasar yang harusnya dimiliki warga negara, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kepemilikan tanah.

Pencabutan status kewarganegaraan tersebut menjadikan Rohingya kelompok tanpa negara (*stateless*) terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 1,28 juta jiwa (UNHCR, 2025). Ketiadaan kewarganegaraan ini memperburuk kerentanan mereka terhadap kekerasan, pemiskinan, dan eksploitasi, karena secara hukum mereka tidak memiliki perlindungan di negara mana pun. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan (Mangku & Lasmawan, 2020).

Karena letak geografis yang berdekatan dan adanya kemiripan etnis, Bangladesh menjadi tujuan utama pelarian bagi etnis Rohingya dari Myanmar. Arus migrasi paksa ini mencerminkan dampak kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar yang tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan domestik, tetapi

juga memberi tekanan sosial dan ekonomi di negara penerima pengungsi seperti Bangladesh. Pada tahun 1991-1992, kebijakan represif tersebut memicu eksodus sekitar 250.000 hingga 280.000 etnis Rohingya ke Cox's Bazar, Bangladesh (Shakira et al., 2024). Gelombang ini menandai salah satu migrasi besar Rohingya yang kemudian terus berlanjut dan bahkan meningkat tajam pada dekade berikutnya akibat berbagai gelombang kekerasan dan penindasan di Myanmar.

Memasuki tahun 2000-an, kebijakan diskriminatif Myanmar terhadap etnis Rohingya semakin meningkat. Pencabutan hak suara melalui penarikan *Temporary Registration Cards* (Kartu Putih) pada 2015 memperparah marginalisasi dan mendorong gelombang migrasi besar-besaran. Krisis Rohingya mencapai puncaknya pada Agustus 2017. Saat itu, bentrokan antara kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan militer Myanmar memicu operasi militer besar-besaran (*clearance operation*), yaitu tindakan pembersihan wilayah yang menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (UNHCR, 2019). Kondisi kamp pengungsian yang padat, keterbatasan pangan, serta ketiadaan status hukum kemudian mendorong sebagian pengungsi melanjutkan perjalanan berisiko tinggi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia melalui jalur laut yang dikenal sebagai fenomena *boat people* (Setiawan, 2021).

Indonesia merupakan negara transit utama bagi pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara. dengan wilayah Aceh menjadi titik pendaratan utama karena letaknya yang berdekatan dengan perairan Laut Andaman (Taufiq et al., 2025). Penerimaan pengungsi oleh Indonesia didasarkan pada prinsip

kemanusiaan serta politik luar negeri bebas aktif yang menjunjung nilai perdamaian dan solidaritas antarbangsa. Meskipun bukan penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia memiliki dasar hukum nasional melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang mengatur mekanisme perlindungan dan penanganan bagi pengungsi (Jannah, 2024).

Gambar 1.1 Kedatangan Pengungsi Rohingya di Pesisir Aceh



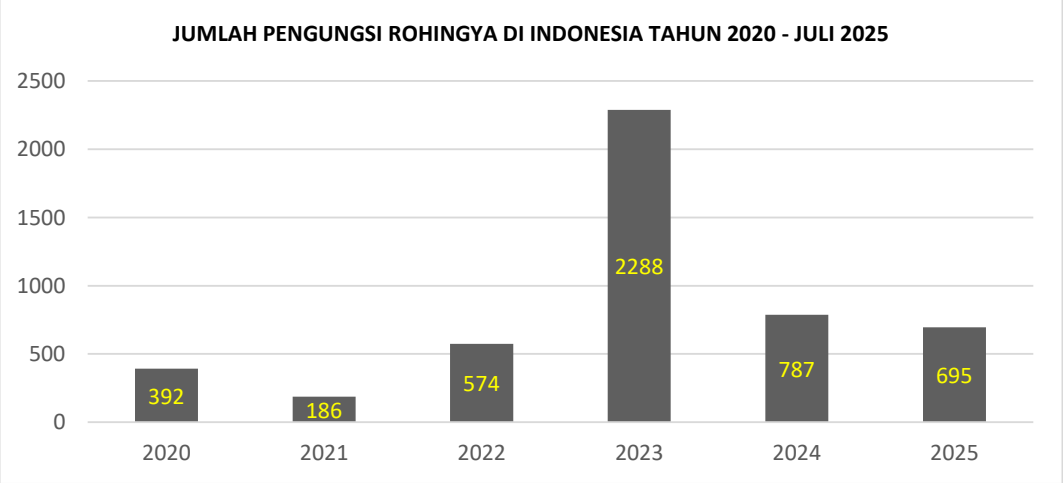
Sumber: UNHCR, 2024

Prinsip kemanusiaan tersebut juga tercermin dalam sikap masyarakat lokal di sejumlah wilayah penerima seperti Aceh dan Sumatera Utara, yang dikenal memiliki solidaritas tinggi serta berpegang pada ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila. Namun, meningkatnya arus kedatangan dalam waktu relatif singkat tanpa diimbangi mekanisme pengelolaan yang memadai kemudian

memunculkan berbagai tantangan di daerah penerima, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan (Taufiq et al., 2025).

Lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023 yang mencapai 2.288 jiwa menunjukkan meningkatnya tekanan kemanusiaan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam sub-indeks *Refugees and Internally Displaced Persons pada Fragile States Index* (FSI) yang meningkat dari 4,3 pada 2022 menjadi 4,4 pada 2023. Sub-indeks tersebut mengukur tekanan perpindahan paksa penduduk terhadap kapasitas negara dalam penyediaan layanan dasar, stabilitas sosial, dan kohesi masyarakat (Fund for Peace, 2024). Dengan demikian, kenaikan skor tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tekanan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah penerima pengungsi, meskipun secara nasional Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara yang mengalami kerentanan serius.

Gambar 1.2 Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2020-2025



Sumber: UNHCR, 2025

Berdasarkan data UNHCR 2025, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia meningkat signifikan pada 2023 dan berlanjut hingga 2024, terutama di wilayah pesisir Aceh. Peningkatan arus pengungsi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong, seperti ketidakstabilan politik di Myanmar, memburuknya kondisi kamp pengungsian di Bangladesh akibat kepadatan dan minimnya sumber pangan, serta berkurangnya bantuan kemanusiaan yang membatasi pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi (GoodStats, 2024).

Lonjakan kedatangan tersebut kemudian memunculkan dampak bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang awalnya menunjukkan solidaritas tinggi terhadap para pengungsi mulai menunjukkan perubahan sikap akibat munculnya beberapa persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya kesiapan pemerintah daerah, terbatasnya dukungan logistik, serta lemahnya koordinasi antarlembaga membuat sebagian masyarakat merasakan adanya tekanan sosial dalam situasi ini (Dewi et al., 2024). Kondisi tersebut terlihat jelas di wilayah pesisir Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai lokasi masuk utama pengungsi Rohingya melalui jalur laut.

Dari sisi sosial, perbedaan budaya, kebiasaan hidup, dan pola komunikasi antara masyarakat lokal dan pengungsi Rohingya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan sosial di beberapa lokasi penerima pengungsi di Indonesia. Beberapa warga menilai pengungsi sebagai pihak yang kurang menghargai bantuan yang diberikan, terutama setelah beredar video yang menunjukkan pengungsi membuang sembako karena menolak penempatan di lokasi tertentu (Sopamena, 2023). Kasus seperti ini memicu

persepsi negatif terhadap pengungsi, seperti anggapan bahwa mereka tidak menghormati nilai kemanusiaan yang dijunjung masyarakat penerima.

Ketegangan sosial tersebut semakin diperburuk oleh sejumlah tindakan oknum pengungsi, seperti upaya melarikan diri ke Malaysia setelah menerima fasilitas penampungan, perilaku yang dinilai melanggar norma sosial, hingga kasus kejahatan serius yang melibatkan anak di bawah umur (Sumitro, 2023). Meskipun sebagian besar pengungsi tidak terlibat dalam insiden tersebut, kasus-kasus ini menumbuhkan rasa tidak percaya dan kecurigaan di kalangan masyarakat, sehingga pengungsi kerap dipersepsikan sebagai beban sosial baru bagi daerah.

Persepsi negatif masyarakat juga dipengaruhi oleh maraknya penyebaran informasi bohong dan narasi kebencian di media sosial. Beberapa akun menyebarkan kabar bahwa pengungsi menerima bantuan uang dari pemerintah Indonesia, padahal sebagian besar bantuan berasal dari lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM (Tempo.co, 2023). Informasi keliru tersebut menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, terungkapnya kasus penyelundupan manusia seperti keterlibatan seorang warga Myanmar yang membawa 137 pengungsi dari Bangladesh ke Aceh dengan bayaran 14-16 juta rupiah per orang mendorong sebagian masyarakat memandang pengungsi sebagai penumpang ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah hukum (Kurniati, 2023). Dalam konteks yang berbeda, di Kota Makassar pengungsi Rohingya telah menetap dalam jangka waktu panjang dan menuntut hak administratif, seperti kepemilikan e-KTP,

sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan hukum nasional (Tribun Aceh, 2023).

Selain itu, peningkatan jumlah pengungsi Rohingya juga menimbulkan tekanan ekonomi dan keamanan bagi masyarakat lokal di sejumlah wilayah penerima. Di Aceh, keberadaan lokasi penampungan dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan lembaga pendukung (Siahaan, 2025).

Tekanan serupa mulai muncul di wilayah lain, seperti Sumatera Utara dan Riau. Di Sumatera Utara, keterbatasan koordinasi pengelolaan pengungsi serta distribusi bantuan kepada pengungsi memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal (Kemenkumham Sumut, 2024). Sementara itu, di Riau, interaksi pengungsi dengan masyarakat setempat menimbulkan keresahan akibat dugaan pengambilan hasil kebun tanpa izin dan kekhawatiran terhadap aspek keamanan penampungan (ANTARA News, 2024). Situasi-situasi tersebut mendorong terbentuknya ketegangan baru antara pengungsi dan warga lokal, karena sebagian masyarakat merasa akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan perhatian pemerintah menjadi terbatas.

Berdasarkan dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan yang telah diuraikan sebelumnya, fenomena kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia menunjukkan kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Peningkatan jumlah pengungsi pada periode 2023-2024 menyoroti keterbatasan sistem penanganan, khususnya dalam koordinasi antarlembaga, kesiapan daerah penerima, dan kapasitas masyarakat wilayah penerima pengungsi.

Kondisi ini mengindikasikan kerentanan sosial serta ketegangan antara pengungsi dan warga lokal, karena sebagian masyarakat merasa hak ekonominya terganggu dan perhatian pemerintah lebih banyak untuk penanganan pengungsi.

Sebagai gambaran, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Steven Rehan Siahaan (2025), Makhisan Nawar dkk. (2025), dan Rizki Yunanda dkk. (2024) sama-sama mengkaji fenomena kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Siahaan (2025) menelaah sekuritisasi Pemerintah Daerah Aceh melalui penyusunan rancangan Qanun penanganan pengungsi luar negeri. Makhisan Nawar dkk. (2025) menganalisis kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh menggunakan konsep *Human Security*, sedangkan Yunanda dkk. (2024) mengkaji dampak sosial keberadaan pengungsi Rohingya terhadap masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia masyarakat lokal di Indonesia secara komprehensif, khususnya berdasarkan dimensi sosial-ekonomi, personal, lingkungan, dan politik pada periode 2023–2024, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia masyarakat lokal menggunakan konsep *Human Security* Tadjbakhsh dan Chenoy sebagai kerangka analisis utama. Analisis dilakukan melalui empat dimensi keamanan manusia, yaitu keamanan sosial-ekonomi, personal, lingkungan, dan politik, dengan cakupan wilayah Aceh, Riau, dan Sumatera Utara pada periode 2023–2024. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai

bentuk-bentuk ancaman keamanan manusia yang muncul akibat kedatangan pengungsi Rohingya.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya Terhadap Ancaman Keamanan Manusia di Indonesia 2023-2024” Identifikasi masalah penelitian yang akan dipaparkan oleh penulis yaitu:

1. Lonjakan pengungsi Rohingya di Indonesia pada 2023-2024 menimbulkan ketegangan sosial dan menurunnya rasa aman masyarakat lokal.
2. Keterbatasan koordinasi antarlembaga dalam penanganan pengungsi Rohingya dapat menimbulkan ketidakpastian kebijakan di daerah penerima.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, Riau, dan Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan manusia di Indonesia pada periode 2023-2024?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan sosial-ekonomi masyarakat Aceh, Riau, dan Sumatera Utara pada tahun 2023-2024.
2. Menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan personal masyarakat Aceh, Riau, dan Sumatera Utara pada tahun 2023-2024.
3. Menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan lingkungan di Aceh, Riau, dan Sumatera Utara pada tahun 2023-2024.
4. Menganalisis dampak kedatangan pengungsi Rohingya terhadap keamanan politik di Aceh, Riau, dan Sumatera Utara pada tahun 2023-2024.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Dampak Kedatangan Pengungsi Rohingya terhadap Keamanan Manusia di Indonesia” diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat penelitian yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada studi mengenai keamanan manusia. Penelitian ini diharapkan

dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana perkembangan kedatangan dan penanganan pengungsi Rohingya memengaruhi kondisi keamanan manusia masyarakat lokal pengungsi lintas negara terhadap kondisi keamanan manusia

di negara penerima. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara isu pengungsi, dinamika sosial masyarakat lokal, dan pendekatan keamanan manusia dalam konteks Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi:

1. Pemerintah Indonesia (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah), sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dengan perhatian pada aspek keamanan manusia.
2. Organisasi internasional, (UNHCR dan IOM), sebagai masukan dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta menyusun strategi perlindungan dan penanganan pengungsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Masyarakat lokal dan LSM, untuk meningkatkan pemahaman dampak kedatangan pengungsi terhadap keamanan manusia dan mendorong hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pengungsi.